

Judul : Tunggu Restu PDIP?
Tanggal : Selasa, 06 Agustus 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Tunggu Restu PDIP?

Belum Ada Kesepakatan di Internal KIK soal Kursi Ketua MPR

JAKARTA—Perebutan kursi ketua MPR RI terus memanasi kalangan partai politik (parpol) yang lolos ke Senayan, khususnya parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pemilu 2019.

Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad mengatakan, sebetulnya tiket untuk meraih kursi tertinggi lembaga tersebut perlu mendapatkan restu dari PDIP. Sebab, PDIP merupakan parpol pemenang Pemilu 2019 dan memimpin Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jilid II dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Saya berasumsi kunci untuk posisi ketua MPR ada di genggamannya PDIP. Oleh karena itu, parpol yang mendapat restu PDIP akan memperoleh jatah kursi MPR periode 2019-2024," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/8).

Dia menyebutkan, dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), posisi

pimpinan DPR diurutkan berdasarkan jumlah perolehan kursi. Maka, sudah tentu yang akan duduk di kursi ketua DPR adalah PDIP serta empat wakil ketua dari Gerindra, Golkar, Nasdem, dan PKB.

Berbeda dengan pemilihan pimpinan MPR, yaitu berdasarkan paket yang terdiri atas empat unsur fraksi DPR dan satu unsur DPD. "Dalam UU MD3 Pasal 427C untuk kursi pimpinan MPR hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Center) itu mengatakan, untuk mengurangi ketegangan dan perpecahan internal KIK, besar kemungkinan PDIP akan memberikan restu untuk kursi ketua MPR ke Gerindra. Pemberian itu sebagai kompensasi atas rekonsiliasi dan membaiknya hubungan antara PDIP-Gerindra yang sejak 2014 lalu renggang. Semua itu karena menjadi rival di Pilpres 2014 dan 2019.

"Lebih aman PDIP menyerahkan tiket ketua MPR ke Partai Gerindra.


Saya berasumsi kunci untuk posisi ketua MPR ada di genggamannya PDIP. Oleh karena itu, parpol yang mendapat restu PDIP akan memperoleh jatah kursi MPR periode 2019-2024.

Andriadi Achmad
Pengamat Politik UPN Veteran Jakarta

Setidaknya sebagai hadiah atas tercapainya rekonsiliasi," ujar Andriadi.

Selain itu, Andriadi juga menilai, perebutan kursi ketua MPR terkait dengan maraknya wacana amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, semua parpol merasa berkepentingan dengan agenda amandemen tersebut.

"Perebutan kursi ketua MPR menjadi ajang menarik bagi parpol terkait adanya wacana amandemen UUD 1945, yaitu mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, menerapkan

kembali GBHN, serta penguatan peran dan fungsi DPD," kata dia.

Pendapat itu sepertinya diamini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mengatakan, wajar apabila Partai Gerindra mendapat posisi ketua MPR. Sebab, Gerindra adalah partai pemenang kedua di Pemilu 2019.

"Partai secara popular vote kedua terbesar. Kita menginginkan berada di dalam posisi pimpinan MPR. Saya kira sangat pantas," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/8).

Meski begitu, Fadli tidak permasalahan jika kursi ketua MPR tidak diberikan ke partai berlambang burung garuda tersebut. Menurutnya, posisi wakil ketua MPR saja sudah cukup. Tidak mesti ketua.

Menurut wakil ketua DPR RI itu, saat ini komunikasi antarpantai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk posisi pimpinan MPR terus berjalan. Semoga dalam waktu dekat komposisi di MPR bisa diselesaikan. "Komunikasi politik sudah berjalan, sudah semakin cair. Ya, tentu bisa saja terjadi komunikasi-komunikasi yang menghasilkan

posisi-posisi baru di dalam paket itu nantinya," pungkasnya.

Politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menegaskan, saat ini belum ada kesepakatan antarpantai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin terkait siapa yang akan menduduki kursi ketua MPR. Pasalnya, sejauh ini belum ada satu partai pun yang telah mengajukan kadernya secara resmi.

"KIK (Koalisi Indonesia Kerja) juga belum membahas hal tersebut (ketua MPR) secara resmi. Mungkin dalam waktu dekat. Kita tunggu saja," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, kemarin.

Taufiqulhadi menegaskan, Ketua MPR periode 2019-2024 mendatang berasal dari partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam KIK. Dia juga tak membantah Golkar memiliki peluang untuk menduduki kursi ketua MPR tersebut.

Namun, sekali lagi dia menegaskan, belum ada kesepakatan apapun di internal KIK terkait siapa yang bakal menduduki kursi ketua MPR. "Tapi, sejauh ini kita belum tahu (calon ketua MPR yang disepakati, Red)," tuntasnya. (aen)